



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSMANDA AZMURANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 196978

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	975.425.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2861 m2/220 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/72 m2 di KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah Seluas 2817 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, WARISAN Rp. 70.425.000		
4. Tanah Seluas 4410 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
5. Tanah Seluas 1800 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	64.200.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.950.000		
2. LAINNYA, CANCAI DAN DINAMO R 175 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT FI Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000		
4. MOTOR, HONDA SCOPY STYLISH Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000		
5. MOTOR, YAMAHA SOLO / NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	233.524.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	329.479.010
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.602.628.010
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.602.628.010

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.